

BAB II

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Akuntabilita Kinerja Instansi Pemerintah
Provinsi Sulawesi Selatan
tahun 2013

BAB . II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. PENDAHULUAN

Sebagai sebuah instansi sektor publik, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah merumuskan rencana strategik yang berorientasi pada hasil dan akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan, tentunya dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Rencana Strategik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memuat Visi, Misi, Tujuan, serta Sasaran, dan bagaimanapun cara pencapaian tujuan maupun sasaran yang telah ditetapkan tersebut merupakan bagian utama dari pembahasan dalam bab ini, sementara sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2013 akan dijelaskan pula secara khusus dalam Perjanjian Kinerja yang merupakan penjelasan tentang Penetapan Kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013.

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), perencanaan strategik merupakan langkah awal dalam melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategik instansi pemerintah membutuhkan integrasi antara kemampuan sumber daya manusia dan ketersediaan sumber daya lain agar dapat memenuhi keinginan stakeholders untuk menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik nasional maupun global.

Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (*strenghts*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan tantangan/kendala (*threats*) yang ada. Analisis terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi serta strategi instansi pemerintah.

Dengan perkataan lain, rencana strategik yang disusun oleh suatu instansi pemerintah setidaknya mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi dan mengarahkan anggota organisasi dalam mengambil keputusan tentang masa depannya, membangun operasi dan prosedur untuk mencapainya, dan menentukan ukuran keberhasilan/kegagalan. Dengan visi,

misi, dan strategi yang jelas dan tepat, maka diharapkan instansi pemerintah dapat menyalurkan antara potensi, dengan peluang, dan kendala yang dihadapi.

Perencanaan stratejik bersama pengukuran, penilaian, dan evaluasi kinerja serta pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan tolok ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Perencanaan stratejik setidaknya digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan: (1) dimana kita berada, (2) kemana kita menuju, dan (3) bagaimana kita ke sana. Dengan melakukan analisis internal dan eksternal, para perencana stratejik mendefinisikan misi organisasi untuk menggambarkan posisi organisasi saat ini. Kemudian, visi dirumuskan untuk menjabarkan kemana organisasi akan dibawa. Penjabaran dari visi dituangkan dalam tujuan dan sasaran stratejik organisasi, yang merupakan kondisi spesifik yang ingin dicapai oleh organisasi di dalam memenuhi visi misinya. Pertanyaan “bagaimana kita menuju ke sana” dijawab dengan merumuskan strategi pencapaian tujuan/sasaran dalam wujud menetapkan program dan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh organisasi.

Dari uraian singkat di atas, unsur-unsur utama yang perlu secara formal didefinisikan dalam suatu perencanaan stratejik adalah pernyataan visi dan misi, penjabaran tujuan dan sasaran stratejik serta perumusan strategi pencapaian tujuan/sasaran berupa program dan kegiatan.

B. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2013 ditetapkan berdasarkan Perda Nomor : 12 tahun 2008, dan dengan ditetapkannya Perda tersebut maka tahun 2008 merupakan tahun peralihan pelaksanaan antara Renstra Pemerintah Provinsi Tahun 2003-2008 dengan RPJMD dimaksud.

Walaupun muatan RPJMD mengalami perubahan jika dibandingkan dengan apa yang termuat dalam Renstra 2003-2008 khususnya dalam hal penetapan agenda dan kebijakan pembangunan, namun program-program pembangunan yang termuat dalam Renstra tetap dilanjutkan dan lebih dipertajam dalam RPJMD Tahun 2008-2013.

RPJMD yang disusun ini dimaksudkan selain sebagai alat kendali dan tolok ukur bagi manajemen pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pembangunan selama lima tahun kedepan, juga sebagai penilaian keberhasilan setiap unit kerja dalam lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

RPJMD bukan hanya merupakan penjabaran ke dalam program-program pembangunan sektor yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan saja, tetapi juga merupakan program pembangunan wilayah yang akan dilaksanakan oleh semua pihak yang terlibat dalam proses pembangunan di wilayah Sulawesi Selatan. Artinya, RPJMD ini merupakan perwujudan komitmen pemerintah, swasta, dan masyarakat di Sulawesi Selatan dalam upaya pembangunan yang akan dilaksanakan secara bersama dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

RPJMD Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mencakup strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program dan kegiatan prioritas yang bersifat indikatif yang berfokus pada dua hal yakni:

Pertama, aspirasi dan kepentingan segenap masyarakat Sulawesi Selatan; *Ke dua*, pengidentifikasian dan penanganan isu-isu strategis dengan sasaran yang dinamis (*moving target*); *Ke tiga*, mengikuti perkembangan zaman; dan *Ke empat*, berorientasi pada tindakan adaptif.

Bagi manajemen pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, RPJMD dimaksudkan sebagai :

- Wadah kebijakan dan program pembangunan dalam skala prioritas yang lebih tajam agar menjadi indikator perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan pembangunan;
- Gambaran rumusan program pembangunan yang akan dilaksanakan;

- Pedoman bagi SKPD dalam penyusunan Renstra SKPD;
- Perwujudan komitmen bersama antara eksekutif, legislatif, swasta dan masyarakat terhadap program-program pembangunan daerah yang akan dibiayai melalui APBD Provinsi;
- Bahan dalam penyusunan RKPD.

Sebagai “alat” bagi manajemen untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah selaras dengan upaya pencapaian visi, misi dan tujuan dan sasaran stratejik, maka dalam dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2013 secara formal didefinisikan pernyataan visi, misi, tujuan dan sasaran stratejik serta strategi pencapaiannya melalui program dan kegiatan.

Adapun gambaran singkat tentang substansi dari muatan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2013 diuraikan sebagai berikut :

1. Pernyataan Visi dan Misi

a. Visi

Visi Pembangunan Sulawesi Selatan merupakan gambaran kesuksesan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan yang disusun dengan memperhatikan Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2008-2028 Sulawesi Selatan, substansi RPJM Nasional, dinamika lingkungan strategis, aspirasi masyarakat dan Pemerintah Sulawesi Selatan, serta visi misi Gubernur/Wakil Gubernur terpilih.

Untuk itu Visi Pembangunan Sulawesi Selatan untuk 5 tahun pertama, dalam RPJMD 2008-2013 adalah sebagai berikut :

“ Sulawesi Selatan sebagai provinsi sepuluh terbaik dalam pemenuhan hak dasar “

Yang dimaksud **Sepuluh Terbaik** indikatornya adalah dengan menggunakan capaian IPM (Indeks Pembangunan Manusia) dibandingkan dengan IPM Provinsi lainnya atau indikator yang lebih realistis adalah dengan menggunakan laju peningkatan IPM itu sendiri. Mengingat posisi Sulsel dalam peringkat IPM Nasional sangat jauh dari 10 besar. Indikator IPM lainnya adalah laju peningkatan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu indikator kemampuan pemerintah dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat.

Yang dimaksud **Pemenuhan Hak Dasar** adalah pemberian fasilitas kepada masyarakat berdasar kewenangan yang dimiliki pemerintah provinsi berupa pelayanan pembangunan dan regulasi. Sepuluh hak dasar yang dimaksud meliputi :

- a) Pangan yang tersedia, terjangkau dan aman;
- b) Layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas;
- c) Layanan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas;
- d) Kesempatan kerja dan lapangan usaha
- e) Layanan perumahan dan sanitasi;
- f) Akses air bersih;
- g) Kepastian pemilikan dan penguasaan tanah;
- h) Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup;
- i) Rasa aman;
- j) Partisipasi dalam kehidupan sosial – politik.

b. Misi

Terdapat 5 (lima) Misi Pembangunan yang diemban Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam upaya mencapai visi pembangunan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2008-2013 yaitu :

- a) **Meningkatkan Kualitas Pelayanan untuk Pemenuhan Hak Dasar Masyarakat.**

Hak dasar yang meliputi : (1) ketersediaan pangan terjangkau dan aman; (2) layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas; (3) layanan pendidikan

yang terjangkau dan berkualitas; (4) kesempatan kerja dan lapangan usaha; (5) layanan perumahan dan sanitasi; (6) akses air bersih; (7) kepastian pemilikan dan penguasaan tanah; (8) sumber alam dan lingkungan hidup; (9) rasa aman dan tentram; (10) partisipasi dalam kehidupan sosial politik.

b) **Mengakselerasi Laju Peningkatan dan Pemerataan Kesejahteraan Melalui Penguatan Ekonomi Berbasis Masyarakat**

Membangun struktur ekonomi yang kompetitif dan berbasis masyarakat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan yang menjamin terciptanya peningkatan pendapatan masyarakat pendapatan masyarakat terkait dengan sektor pertanian yang mengandalkan sumberdaya lokal. Membangun kelembagaan ekonomi masyarakat (UMKM) yang kreatif dan adaptif.

c) **Mewujudkan Keunggulan Lokal untuk Memicu Laju Pertumbuhan Ekonomi Wilayah**

Menciptakan identitas wilayah provinsi yang kuat, dalam arti diterima dan diposisikan sebagai pusat pelayanan dan pusat pembangunan ekonomi dan sosial budaya di Kawasan Timur Indonesia. Membangun sistem ekonomi wilayah yang berbasis masyarakat melalui pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan yang menjamin terciptanya entitas komunitas yang kreatif dan adaptif. Membangun interkoneksi antar pelaku ekonomi sebagai suatu entitas wilayah yang kuat, dan secara eksternal berintegrasi dengan sistem jaringan bisnis internasional.

d) **Menciptakan Iklim Kondusif Bagi Kehidupan yang Inovatif**

Menciptakan iklim yang kondusif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dengan membangun sistem hukum yang responsif dan menjamin adanya kepastian hukum bagi masyarakat serta terbangunnya kelembagaan pemerintah yang berwibawa dan bebas KKN,

sehingga terbangun kehidupan masyarakat yang mampu menciptakan inovasi dalam meningkatkan kemampuannya secara berkesinambungan.

e) **Menguatkan Kelembagaan dalam Perwujudan Tatakelola yang Baik**

Terciptanya sinergi pencapaian tujuan pemerintah, swasta, dan masyarakat melalui pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan dengan penerapan prinsip-prinsip good governance. Proses sinergitas pencapaian tujuan tersebut diawali dengan optimalisasi pelayanan publik yang menjamin terciptanya kesejahteraan masyarakat. Mengembangkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh, yang didukung oleh adanya partisipasi optimal dari seluruh lapisan masyarakat.

2. **Tujuan, Sasaran Strategik dan Rencana Kinerja**

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan tujuan strategik berdasarkan visi, misi dan faktor-faktor kunci keberhasilan. Sasaran-sasaran strategik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategik organisasi dan dirumuskan untuk masing-masing tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun Tujuan dan Sasaran Strategik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2008-2013 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tujuan I : Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat.

Sasaran A : Meningkatnya kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan.

Indikator (Sasaran Kinerja) :

- a. Meningkatnya Angka Indeks Pendidikan mencapai 79,8.
- b. Mewujudkan angka Indeks kesehatan sebesar 76,1 yang dicerminkan oleh Angka Harapan Hidup 70,64 Tahun.
- c. Menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI) 57,5 per 100.000 kelahiran hidup.
- d. Meningkatnya cakupan air bersih terlayani 70 persen rumah tangga di pedesaan.

- e. Meningkatnya angka Rata-rata Lama Sekolah hingga mencapai 8,49 Tahun dan meningkatnya APK dan APM.
- f. Meningkatnya mutu pendidikan, dengan membaiknya indikator persentase kelulusan dalam pelaksanaan ujian nasional.
- g. Berkurangnya jumlah penduduk kurang pangan dan gizi, yang dicerminkan prevalensi gizi kurang pada anak balita dibawah 14 pesen dan gizi buruk pada angka dibawah 4 persen.
- h. Meningkatnya Indikator capaian layanan air bersih diperkotaan 86 persen rumah tangga.
- i. Layanan perbaikan lingkungan/perumahan sehat, serta sanitasi 84 persen dan PHBS 72 persen pada rumah tangga.

Tujuan II : Meningkatkan dan Menciptakan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat.

Sasaran B : Meningkatnya Produksi dan Pemasaran Hasil Pertanian.

Indikator (Sasaran Kinerja) :

- a. Meningkatnya produksi beras, dengan sasaran surplus beras mencapai 3 juta ton;
- b. Meningkatnya produksi jagung di atas 1,57 juta ton;
- c. Meningkatnya populasi ternak sapi 1,2 – 1,3 juta ekor;
- d. Meningkatnya produksi Udang segar mencapai di atas 23.200 ton ;
- e. Meningkatnya ekstensifikasi dan diversifikasi pada areal pengelolaan lahan pertanian;
- f. Meningkatnya jumlah produksi Coklat mencapai 325.000 ton;
- g. Meningkatnya jumlah Produksi Rumput Laut mencapai 1 juta ton;
- h. Terpenuhinya kebutuhan Sarana Produksi Pertanian dan Perikanan;
- i. Meningkatnya Nilai ekspor komoditas sector pertanian dan perikanan.

Tujuan III : Mewujudkan Keunggulan Lokal untuk Memicu Laju Pertumbuhan Perekonomian.

Sasaran C : Meningkatnya Industri Pengolahan dan Pariwisata Unggulan.

Indikator (Sasaran Kinerja) :

- a. Investasi (ADHK) untuk pertumbuhan 8,11 mencapai 12,91 Triliun Rupiah;
- b. Nilai PDRB (ADHK) diharapkan mencapai 65,12 Triliun Rupiah;

- c. Pendapatan Perkapita (ADHK) dapat mencapai sebesar 17,8 juta Rupiah;
- d. Paritas Daya Beli mencapai 649.400 Rupiah atau mencapai Indeks 66,9;
- e. Target Pertumbuhan Ekonomi diharapkan mencapai 8,11 persen;
- f. Pertumbuhan Industri Pengolahan mencapai di atas 8 persen;
- g. Nilai ekspor Non Tambang/Migas diharapkan mengalami peningkatan 15 persen;
- h. Pertumbuhan Sektor Pertanian diharapkan mencapai 4 hingga 5 persen;
- i. Wisatawan Manca Negara mencapai 120.000 kunjungan , dan wisawaan nusantara menc kunjungan mencapai 5,5 juta kunjungan;
- j. Pengembangan objek wisata yang masuk unggulan Sulawesi Selatan.

Tujuan IV : Mewujudkan Sulawesi Selatan sebagai Entitas Sosial Ekonomi yang Berkeadilan, Asri, dan Lestari.

Sasaran D : Perluasan Kesempatan Kerja dan Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja

Indikator (Sasaran Kinerja) :

- a. Menurunnya angka pengangguran terbuka dibawah 6 persen;
- b. Jumlah penduduk yang bekerja diharapkan di atas 7 persen (usia 15 ke atas);
- c. Menurunnya angka penduduk miskin di bawah 9 persen;
- d. Jumlah penduduk mencapai 8,23 Juta Jiwa;
- e. Meningkatnya luaran tenaga kerja siap pakai dari lembaga pendidikan formal dan non formal;
- f. Mendorong optimalisasi Fungsi Balai Latihan Kerja (BLK);
- g. Memperluas kerjasama dengan dunia usaha terkait peluang Tenaga Kerja;;
- h. Tersedianya tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar (informasi pasar tenaga kerja);
- i. Meningkatnya produktifitas tenaga kerja.

Tujuan V : Menciptakan Lingkungan Kondusif bagi Kehidupan Inovatif.

Sasaran E : Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Lingkungan Hidup.

Indikator (Sasaran Kinerja) :

- a. Meningkatnya proporsi panjang jaringan jalan provinsi 144 Km dan 96 persen dalam kondisi mantap;

- b. Meningkatnya rasio desa berlistrik dari 85 menjadi 90 persen Tahun 2013 ;
- c. Meningkatnya ketersediaan sumberdaya Energi Listrik sesuai kebutuhan yang semakin meningkat;
- d. Meningkatnya pengelolaan sumberdaya energi alternatif sebagai energi pengganti Migas;
- e. Meningkatnya layanan air bersih perdesaan 70 persen dan diperkotaan 86 persen;
- f. Meningkatnya jaringan irigasi kondisi baik 85 persen dan terkelolanya 75.000 Ha, lahan pertanian;
- g. Tertatanya permukiman yang layak huni dari aspek kesehatan dan lingkungan;
- h. Terpeliharanya kondisi dan kualitas lingkungan hidup/berkurangnya kerusakan lingkungan hidup;
- i. Berkurangnya tingkat kerusakan DAS dan luasan lahan kritis (rehabilitasi hutan).

Tujuan VI : Memperkuat Kelembagaan Masyarakat.

Sasaran F : Pembinaan serta Pengembangan Koperasi dan UMKM

Indikator (Sasaran Kinerja) :

- a. Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Koperasi dan UMKM.;
- b. Meningkatnya Skim kredit bagi petani dan nelayan (mendrikan koperasi BPR 27 Unit) di Kabupaten/Kota yang potensial pengembangan;;
- c. Terbangunnya mekanisme per;agangan dan kelembagaan pasar yang sehat dan berpihak pada pelaku usaha kecil dan menengah serta koperasi dalam manajemen pengelolaan usaha;
- d. Pengembangan Koperasi Wanita yang mandiri dan berbadan hukum;
- e. Meningkatnya jumlah UMKM yang layak perbankan dan berkembangnya lembaga penjamin kredit;
- f. Meningkatnya Nilai Kredit yang tersalur dari lembaga keuangan kepada Koperasi dan UMKM;
- g. Tersedianya regulasi yang mengatur pengembangan dan pembinaan Koperasi dan UMKM di Kabupaten/Kota.

C. PERJANJIAN KINERJA 2013

Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis tahun 2008-2013, maka setiap tahun sejak tahun 2010 dilakukan Penetapan Kinerja yang merupakan penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun. Penetapan kinerja ini menunjukkan nilai yang melekat pada setiap indikator kinerja pada tingkat sasaran dan merupakan perbandingan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi.

Penetapan Kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013 merupakan komitmen seluruh aparat Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk mencapai kinerja dalam tahun ketiga pelaksanaan Rencana Stragis sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi. Dengan demikian, seluruh proses perencanaan dan pengendalian aktivitas operasional Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sepenuhnya dapat dirujuk pada kinerja sasaran yang ditetapkan pada tahun 2013.

Dalam upaya mencapai Visi Pembangunan Daerah seperti yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2013, maka pada tahun 2013 Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berupaya ***Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kebutuhan Dasar dan Peningkatan Pendapatan Masyarakat.***

Untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan ***sasaran strategis pembangunan daerah untuk tahun 2013*** sebagai berikut ;

1. **Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan**

Oleh karena pendidikan dan kesehatan merupakan salah satu pilar terpenting dalam meningkatkan kualitas manusia, maka peningkatan aksesibilitas terhadap pendidikan dan kesehatan merupakan aspek yang harus dilaksanakan secara terus

menerus dan berkelanjutan.. Berbagai dokumen sebagai hasil kesepakatan-kesepakatan internasional secara jelas menekankan pentingnya pendidikan dan kesehatan sebagai salah satu aspek penekanan untuk penanggulangan kemiskinan, peningkatan keadilan, kesetaraan gender, serta pemahaman nilai-nilai budaya.

Dengan kondisi tingkat pendidikan dan kesehatan penduduk yang tergolong masih rendah, maka upaya untuk memperbaiki akses penduduk terhadap pendidikan dan kesehatan harus dipercepat untuk mencapai manusia Sulawesi Selatan yang berkualitas baik dan berdaya saing.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja terhadap apa yang telah dicapai serta memperhatikan program dan kegiatan Tahun 2013 dan dengan mengingat keterbatasan sumberdaya yang dimiliki terutama sumberdaya finansial, maka dalam rangka efisiensi dan efektifitas pembangunan wilayah Sulawesi Selatan, maka pencapaian tujuan pembangunan tahun 2013 ditempuh dengan penetapan sasaran pokok.

Masalah utama bidang pendidikan terletak pada akses masyarakat dalam mendapatkan layanan pendidikan dasar, khususnya dalam menuntaskan wajib belajar dua belas tahun. Ini terkait dengan biaya yang harus ditanggung, terutama dalam pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. Di samping itu, ketersediaan sebaran fasilitas pendidikan yang kurang memadai dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat. Kelangkaan fasilitas ini semakin meningkat seiring dengan meningkatnya strata pendidikan. Kualitas penyelenggaraan pendidikan juga membutuhkan perhatian khusus.

Kualitas dimaksud terkait dengan standar isi dan proses pembelajaran, kompetensi, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian. Penyebab ketiga adalah sikap atau wawasan masyarakat terhadap pentingnya pendidikan. Di kalangan petani dan nelayan, anak lebih banyak dipandang sebagai aset produktif ketimbang sebagai "media" investasi (melalui pendidikan).

Sedangkan masalah utama pada bidang kesehatan terkait dengan belum optimalnya penerapan pola hidup sehat dan rendahnya derajat kesehatan lingkungan dalam masyarakat, rendahnya akses terhadap layanan kesehatan terutama pada masyarakat terpencil dan pulau-pulau serta belum mantapnya manajemen pembangunan kesehatan. Ketersediaan pangan yang terjangkau dengan kondisi daya beli masyarakat juga merupakan akar masalah dalam upaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, karena sangat terkait dengan kualitas gizi masyarakat.

Adapun sasaran yang diharapkan dapat dicapai melalui penetapan prioritas pembangunan ini antara lain sebagai berikut ;

- Meningkatkan Angka Indeks Pendidikan mencapai 79,8
- Mewujudkan Angka Indeks Kesehatan sebesar 76.1
- Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang dicerminkan oleh Angka harapan hidup 70,64 tahun dengan beberapa indikator antara lain, menurunkan angka IMR per seribu kelahiran, Menurunkan AKI per seribu.
- Meningkatkan cakupan air minum terlayani 70 persen rumah tangga di perdesaan.
- Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat yang dicerminkan oleh Angka Rata-rata Lama Sekolah diharapkan mencapai 8,49 tahun dan meningkatnya APK dan APM.
- Meningkatkan mutu pendidikan, dengan membaiknya indikator persentase kelulusan dalam pelaksanaan ujian nasional.
- Berkurangnya jumlah penduduk kurang pangan dan gizi, yang dicerminkan prevalensi gizi kurang pada anak balita dibawah 14 persen, gizi buruk pada angka dibawah 4 persen.
- Meningkatkan persentase lingkungan/perumahan sehat, sanitasi dan air bersih dengan indikator capaian berupa cakupan air minum perkotaan diatas 86 persen rumah tangga, meningkatkan persentase cakupan sanitasi pada rumah tangga khususnya dipedesaan.
- Meningkatkan perbaikan lingkungan/perumahan sehat serta sanitasi mencapai 84 persen.
- Meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat pada rumah tangga mencapai 72 persen.

2. Peningkatan Produksi dan Pemasaran hasil Pertanian

Tingkat kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, dan hal ini sangat tergantung pada aktivitas perekonomian di daerah tersebut. Karena sebagian besar masyarakat hidup pada sektor pertanian, maka pembangunan ekonomi kerakyatan diarahkan pada peningkatan produksi melalui pengembangan industri berbasis komoditas lokal. Upaya tersebut diharapkan dapat memberikan nilai tambah pada setiap komoditi.

Revitalisasi pertanian dalam arti luas dilakukan untuk mendukung pencapaian sasaran perluasan dan penciptaan lapangan kerja, terutama di daerah perdesaan disamping untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas serta peningkatan kualitas sumberdaya petani dan nelayan dalam rangka meningkatkan ketahanan ekonomi wilayah. Upaya yang ditempuh tersebut selain menekan jumlah penduduk miskin, juga sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing komoditi pertanian di masa depan.

Adapun keberhasilan **peningkatan produksi dan pemasaran hasil pertanian** yang merupakan salah satu sasaran pembangunan tahun 2013. dapat dilihat pada pencapaian indikator-indikator sebagai berikut;

- Meningkatkan produksi beras yang mencapai surplus 3 juta Ton.
- Meningkatkan produksi jagung mencapai di atas 1.5 juta Ton.
- Meningkatkan populasi ternak sapi mencapai 1,2 – 1,3 juta ekor.
- Meningkatkan produksi udang segar di atas 23.200 Ton
- Ektensifikasi dan diversifikasi pada areal pengolahan lahan pertanian.
- Meningkatkan jumlah produksi coklat mencapai 325.000 Ton.
- Meningkatkan jumlah produksi Rumput laut 1 juta Ton.
- Terpenuhinya kebutuhan sarana produksi Pertanian dan perikanan.
- Meningkatnya nilai ekspor komoditas sector pertanian dan perikanan.

3. **Peningkatan Industri Pengolahan dan Pariwisata Unggulan.**

Pembangunan ekonomi terkait Industri pengolahan dan pengembangan pariwisata merupakan sektor unggulan di Sulawesi Selatan, diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan petani khususnya pada kelompok masyarakat marginal tanpa mengesampingkan kelompok usaha ekonomi menengah keatas, yang tentunya didukung oleh penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian diharapkan daya saing wilayah akan mengalami peningkatan.

Adapun keberhasilan **peningkatan industri pengolahan dan pariwisata unggulan** yang merupakan salah satu sasaran pembangunan tahun 2013 dapat dilihat pada pencapaian indikator-indikator sebagai berikut;

- Nilai investasi untuk pembangunan daerah diharapkan dapat mencapai 12,91 Trilyun Rupiah.
- Nilai PDRB (ADHK) diharapkan mencapai 65,12 Trilyun Rupiah.
- Pendapatan perkapita (ADHB) dapat mencapai sebesar 17,8 juta Rupiah.
- Kenaikan indeks daya beli masyarakat dapat mencapai 66,9 atau 694.400 Rupiah.
- Perkiraan pertumbuhan ekonomi diharapkan berada pada 8,11 persen.
- Perkiraan pertumbuhan industri pengolahan diharapkan berada di atas 8 persen.
- Perkiraan nilai ekspor non migas/tambang mencapai peningkatan 15 persen.
- Peningkatan pertumbuhan sector pertanian mencapai 4 hingga 5 persen.
- Perkiraan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 120.000 kunjungan dan wisatawan nusantara sebanyak 5,5 juta kunjungan yang didukung dengan adanya Pengembangan objek- objek wisata.

4. **Perluasan Kesempatan Kerja dan Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja**

Ketenagakerjaan merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, dengan ruang lingkup meliputi aspek penawaran dan permintaan tenaga kerja, perencanaan ketenagakerjaan, dan informasi pasar kerja/peluang kerja. Semua aspek ini sangat menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah termasuk Sulawesi Selatan. Hal ini disebabkan karena tingkat kualitas dan kuantitas produksi barang dan jasa yang

dihasilkan sangat tergantung dari ketersediaan dan kualitas tenaga kerja yang tersedia. Ketersediaan tenaga kerja tersebut tidak hanya dilihat dari jumlahnya tetapi kualitas dan produktifitasnya

Adapun keberhasilan **Perluasan Kesempatan Kerja dan Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja** yang merupakan salah satu sasaran pembangunan tahun 2013 dapat dilihat pada pencapaian indikator-indikator sebagai berikut;

- Menurunnya angka pengangguran terbuka dibawah 6 persen.
- Meningkatnya penduduk yang bekerja (usia 15 tahun ke atas) di atas 7 persen.
- Menurunkan angka penduduk miskin dibawah 9 persen.
- Bertambahnya jumlah penduduk mencapai 8,23 juta jiwa.
- Meningkatkan lulusan/keluaran tenaga kerja siap pakai dari lembaga pendidikan formal dan non formal.
- Mendorong optimalisasi Fungsi Balai Latihan Kerja (BLK)
- Membangun kerjasama dengan dunia usaha terkait peluang tenaga kerja, dengan dukungan Informasi Pasar Tenaga Kerja.
- Meningkatkan produktifitas tenaga.

5. **Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Lingkungan Hidup**

Infrastruktur wilayah merupakan pendukung utama dalam memicu aktifitas sosial ekonomi suatu daerah. Infrastruktur meliputi sarana transportasi, energi listrik dan migas, penataan pengelolaan SDA yang berwawasan lingkungan termasuk pengairan. Untuk itu diperlukan percepatan pembangunan infrastruktuktur wilayah secara terpadu dan berkesinambungan di Sulawesi Selatan seperti jaringan transportasi darat, laut dan udara secara terpadu yang mengarah kepada peningkatan kualitas pelayanan dan perluasan akses. Demikian pula pembangunan infrastruktur energi/ketenagalistrikan, dan pengelolaan sumberdaya air. Sementara untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berkualitas harus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.,

Adapun keberhasilan **Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Lingkungan Hidup** yang merupakan salah satu sasaran pembangunan tahun 2013 dapat dilihat pada pencapaian indikator-indikator sebagai berikut :

- Meningkatnya proporsi panjang jaringan jalan provinsi 144 km, dengan kondisi baik 96 persen.
- Meningkatkan rasio desa berlistrik dari 85 persen menjadi 90 persen.
- Penambahan pembangunan sumberdaya Energi Listrik sesuai kebutuhan yang semakin meningkat.
- Meningkatkan pengelolaan sumberdaya energi alternatif sebagai energi pengganti Migas.
- Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana air bersih pedesaan mencapai 70 persen.
- Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana air bersih perkotaan mencapai 86 persen.
- Meningkatkan jaringan irigasi kondisi baik menjadi 85 persen.
- Peningkatan jumlah pengelolaan lahan pertanian menjadi 75.000 Ha.
- Penataan permukiman yang layak huni dari aspek kesehatan dan lingkungan.
- Terpeliharanya kondisi dan kualitas lingkungan hidup/berkurangnya kerusakan lingkungan hidup.
- Berkurangnya tingkat kerusakan DAS dan luasan lahan kritis (rehabilitasi hutan).

6. Pembinaan serta Pengembangan Koperasi dan UMKM

Keberadaan lembaga ekonomi sangat menentukan pengembangan dan pemberdayaan pelaku usaha, terutama usaha kecil dan menengah yang dalam berbagai hal mempunyai banyak keterbatasan. Kelembagaan ekonomi masyarakat tidak hanya menyangkut organisasi pengembangan usaha, akan tetapi juga meliputi ketersediaan regulasi yang mendukung dan tatacara dalam menata usaha guna mencapai tujuan yang dikehendaki. Penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat akan meningkatkan kemampuan pelaku usaha dalam menghasilkan produk yang berkualitas dan berdaya saing tinggi dipasaran.

Dalam upaya mengembangkan perekonomian daerah pemerintah daerah akan terus mendorong, memfasilitasi tumbuh kembangnya kelembagaan ekonomi khususnya yang berkaitan dengan pengembangan dunia usaha, koperasi, usaha mikro kecil dan menengah. Hal ini dibutuhkan karena dengan kelembagaan ekonomi yang baik dan kuat akan memberi dampak positif bagi peningkatan produksi dan pengembangan usaha.

Untuk mencapai hal tersebut beberapa indikator keberhasilan berkaitan pencapaian sasaran **pembinaan serta pengembangan koperasi dan UMKM** yang perlu mendapatkan perhatian, yakni :

- Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKM sebagai usaha unggulan.
- Meningkatkan Skim Kredit bagi petani dan nelayan (mendirikan koperasi BPR) sebanyak 27 unit di Kabupaten/Kota.
- Membangun mekanisme perdagangan dan kelembagaan pasar yang sehat dan berpihak pada pelaku usaha.
- Meningkatkan kualitas SDM pelaku usaha kecil dan menengah serta koperasi dalam majemem pengelolaan usaha.
- Meningkatkan jumlah Koperasi Wanita yang berbadan hukum, mandiri dan berkualitas.
- Meningkatkan jumlah UMKM yang layak perbankan, dan berkembangnya lembaga penjamin kredit.
- Meningkatkan Nilai Kredit yang tersalur dari lembaga keuangan kepada Koperasi dan UMKM.
- Adanya regulasi yang mengatur pengembangan dan pembinaan koperasi dan UMKM di Kabupaten/Kota.

Adapun matriks tentang Penetapan Kinerja bersama Indikator Kinerja dan Target-target Kinerja yang akan dicapai pada tahun 2013 ditunjukkan melalui **lampiran - 1**.